

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

##### 2.1.1. Arsoy *et all* (2012)

Penelitian yang dilakukan di Turki ini dilatarbelakangi atas perhatian peneliti terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan corporate social responsibility. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti hubungan antara CSR dan kinerja suatu perusahaan, dan peneliti ingin melakukan penelitian ini di negara berkembang yaitu Turki. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara corporate social performance dan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan pada pengukuran akuntansi berbasis performance. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan CSR di suatu perusahaan dapat menyebabkan tercapainya suatu kinerja yang lebih baik.

**Persamaan :** Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dependen yaitu ROA dan ROE. Selain itu ada persamaan pada variabel independen yang digunakan yaitu pengungkapan CSR.

**Perbedaan :** Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada sampel yang digunakan. Penelitian ini menggunakan sampel berupa perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan memiliki rating tertinggi di *Istanbul Stock Exchange Corporate Governance Index*.

### 2.1.2. Kartika Hendra Titisari, dkk (2010)

Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh CSR pada kinerja perusahaan. Peneliti menganalisis CSR dengan parameter *community*, *environment*, dan *employment*, dan menggunakan CAR sebagai proksi dari kinerja perusahaan. Sampel dari penelitian adalah 32 laporan tahunan perusahaan tahun 2005 dan 2006 dari perusahaan yang berada dalam industri rawan lingkungan dan mengikuti program PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan melaporkan aktivitas CSR dalam laporan tahunannya. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis regresi dalam empat tahap. Berdasarkan analisis regresi, peneliti tidak menemukan pengaruh CSR terhadap stock return. Peneliti juga tidak menemukan pengaruh yang signifikan CSR dengan parameter *community* dan *environmental* terhadap *stock return*. Di sisi lain, peneliti menemukan pengaruh yang signifikan dari CSR dengan parameter *employment* terhadap *stock return*.

**Persamaan :** Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada variabel independen dan variabel dependennya. Variabel independennya adalah corporate social responsibility dan variabel dependennya adalah kinerja keuangan yang diukur dengan *stock return*.

**Perbedaan :** Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada penetapan sampel dan cara pengukuran *stock return*. Selain itu penelitian terdahulu menjabarkan variabel CSR menjadi beberapa parameter, sedangkan penelitian yang sekarang tidak.

### **2.1.3. Lely Dahlia dan Sylvia Veronica Siregar (2008)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan dan kinerja pasar perusahaan. Penelitian ini dilakukan karena melihat rendahnya aktivitas pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia dan adanya perbedaan hasil dari penelitian yang sebelumnya. Penelitian ini menggunakan Indeks CSR untuk mengukur pengungkapan CSR berdasarkan indikator yang dikeluarkan oleh GRI. Sampel dari penelitian ini adalah 77 perusahaan yang terdaftar di IDX dalam periode 2005 hingga 2006. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa pengungkapan CSR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROE yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Hasil selanjutnya memperlihatkan bahwa pengungkapan CSR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CAR yang digunakan sebagai ukuran kinerja pasar.

**Persamaan :** Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada variabelnya. Variabel independennya adalah CSR. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan yang diukur dengan ROE. Persamaan lainnya adalah pada metode pengukuran indeks CSR, yakni dengan menggunakan indikator yang dikeluarkan oleh GRI.

**Perbedaan :** Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada penetapan sampelnya. Jika penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan-perusahaan yang terdaftar tanpa membedakan jenis perusahaan, dengan periode penelitian yaitu tahun 2005-2006, penelitian sekarang menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia dari tahun 2008-2011.

#### 2.1.4. Lindrawati, dkk (2008)

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti empiris dari pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan (ROE dan ROI) perusahaan yang terdaftar sebagai 100 *Best Corporate Citizens* mulai tahun 2000-2006. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan yang di survei KLD dan termasuk dalam 100 *Best Corporate Citizens* untuk tahun 2000-2006. CSR sebagai variabel X diukur dengan menggunakan indeks *return shareholder* dan *stakeholder* yang dipublikasikan oleh *Business Ethics:KLD Research & Analytics*. Kinder, Lydenberg and Domini *Research & Analytics, Inc*. Sementara kinerja keuangan diukur dengan menggunakan ROE dan ROI. Analisis yang menggunakan metode regresi yang sederhana ini menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE namun berpengaruh signifikan terhadap ROI.

**Persamaan :** Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada variabelnya. Variabel independennya adalah CSR. Variabel dependennya adalah kinerja keuangan yang diukur dengan ROE. Persamaan lainnya adalah pada metode pengujian hipotesisnya, yaitu sama-sama menggunakan regresi sederhana.

**Perbedaan :** Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada penetapan sampelnya. Jika penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan yang di survei KLD dan termasuk dalam 100 *Best Corporate Citizens* untuk tahun 2000-2006, penelitian sekarang menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia dari tahun 2008-2011.

### **2.1.5. Nurika Restuningdiah (2007)**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari kinerja lingkungan pada pengungkapan CSR, lalu pengaruh pengungkapan CSR pada ROA, dan pengaruh tidak langsung dari kinerja lingkungan pada ROA melalui pengungkapan CSR. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang listing di BEI dan memiliki data PROPER pada periode 2007-2008. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa kinerja lingkungan memiliki pengaruh yang negatif terhadap pengungkapan CSR. Selain itu pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap ROA. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung yang positif dari kinerja lingkungan pada ROA melalui pengungkapan CSR.

**Persamaan :** Pada dasarnya penelitian ini memiliki 2 variabel independen yaitu kinerja lingkungan dan CSR, dimana 2 variabel tersebut diuji apakah memiliki pengaruh terhadap ROA. Namun penelitian sekarang mengambil persamaan pada penggunaan variabel independen berupa CSR, dan dilihat pengaruhnya terhadap ROA.

**Perbedaan :** Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada penetapan sampel yakni berupa perusahaan manufaktur yang listing di BEI dan memiliki data PROPER pada periode 2007-2008, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur yang memiliki annual report dan atau sustainability report pada tahun 2008-2011.

### 2.1.6 Susi Sarumpaet (2005)

Penelitian ini menguji hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan perusahaan yang ada di Indonesia. Kinerja lingkungan diukur dengan peringkat lingkungan dalam PROPER, sedangkan kinerja keuangan diukur dengan ROA (*Return On Asset*). Beberapa variabel kontrol juga dimasukkan dalam analisis ini, yaitu: total asset, sektor industri, listing di BEJ, dan sertifikasi ISO 14001. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan tidak berhubungan secara signifikan dengan kinerja lingkungan, akan tetapi ukuran perusahaan, listing di BEJ dan ISO 14001 berhubungan secara signifikan terhadap kinerja lingkungan.

**Persamaan:** Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah variabel dependennya yaitu ROA. Penelitian ini tidak menggunakan CSR sebagai variabel independen, namun menggunakan kinerja lingkungan. Hal yang perlu diketahui bahwa kinerja lingkungan tersebut merupakan salah satu indikator dengan item terbanyak dari pengukuran CSR itu sendiri.

**Perbedaan :** Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada variabel independennya. Variabel independen dari penelitian ini adalah kinerja lingkungan, sedangkan penelitian sekarang menggunakan CSR. Selain itu penetapan sampel yang digunakan juga berbeda. Penelitian ini menggunakan data dari perusahaan yang mengikuti program PROPER dan terdaftar di database nasional ISO 14001, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan manufaktur yang mengeluarkan annual report secara berturut-turut dari tahun 2008 hingga tahun 2011.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Kinerja keuangan**

Menurut Pabundu Tika (2006) kinerja merupakan hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang maupun kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.

Pengertian kinerja lainnya adalah ukuran seberapa efisien dan efektif seorang manajer atau sebuah perusahaan, seberapa baik manajer atau perusahaan tersebut mencapai tujuan yang memadai (Stonner 1995 dalam Lindrawati, dkk 2008).

Kinerja bagi suatu perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi dari perusahaan tersebut. Dengan mengetahui kinerja suatu perusahaan, para pihak yang berkepentingan dapat mengetahui tentang baik buruknya keadaan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Kinerja suatu perusahaan dapat diukur baik secara keuangan maupun non keuangan.

Kinerja keuangan bisa diartikan sebagai penentuan ukuran – ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Yusriati Nur Farida, dkk (2005) menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektivitas dan efisien suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Jadi kinerja keuangan adalah kemampuan kerja manajemen keuangan dalam mencapai prestasi kerjanya. Kinerja perusahaan yang baik tentunya akan memudahkan perkembangan

perusahaan itu sendiri misalnya perusahaan akan mudah dalam memperoleh pinjaman dan mendapatkan investor.

### **2.2.2. Pengukuran kinerja**

Pengukuran kinerja adalah proses menentukan seberapa baik aktivitas bisnis dilakukan untuk mencapai tujuan, strategi, mengeliminasi pemborosan-pemborosan dan menyajikan informasi tepat waktu untuk melakukan penyempurnaan secara berkesinambungan (Lindrawati, dkk 2008).

Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, laba bisa menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Namun kenyataannya laba yang tinggi belum tentu memperlihatkan kinerja yang baik. Maka dari itu dapat digunakan suatu ukuran atau tolok ukur tertentu untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Untuk itu dibutuhkan analisis dengan alat-alat analisis keuangan untuk mengukur kinerja tersebut.

Analisis keuangan suatu perusahaan harus didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum. Data keuangan ini biasa disebut Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Laporan keuangan inilah yang akan dianalisis dan akan menghasilkan ukuran kinerja suatu laporan keuangan. Kegunaan analisis laporan keuangan ini adalah untuk membantu pemakai dalam memprakirakan masa depan dengan cara membandingkan, mengevaluasi, dan menganalisis



kecenderungan (Budi Rahardjo, 2007). Biasanya ukuran yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan.

Menurut Mamduh Hanafi dan Abdul Halim (2009:76), pada dasarnya analisis rasio bisa dikelompokkan ke dalam lima kategori yaitu :

1. Rasio likuiditas.

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya (hutang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan). Contoh dari rasio ini adalah sebagai berikut :

1) Rasio Lancar

Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya (aktiva yang akan berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun atau satu siklus bisnis). Rasio lancar dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$Rasiolancar = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}}$$

2) Rasio Cepat

Rasio cepat adalah perbandingan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan kewajiban jangka pendek (hutang lancar). Ini dilakukan karena persediaan biasanya dianggap merupakan aset yang paling tidak liquid. Rasio cepat dihitung dengan cara berikut:

$$Rasiocepat = \frac{\text{Aktiva lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang lancar}}$$

## 2. Rasio Aktivitas

Rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. Contoh dari rasio ini adalah sebagai berikut:

### 1) Rata-rata umur piutang

Rasio ini melihat berapa lama yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin lama rata-rata piutang berarti semakin besar dana yang tertanam pada piutang. Rata-rata umur piutang bisa dihitung melalui dua tahap yaitu dengan menghitung perputaran piutang dan kemudian menghitung rata-rata umur piutang. Rumusnya adalah seperti dibawah ini :

$$\text{Perputaran Piutang} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Piutang}}$$

$$\text{Rata-rata umur piutang} = 365/\text{Perputaran piutang}$$

### 2) Perputaran persediaan

Rasio ini memperlihatkan perputaran persediaan, dimana perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan

berputar dalam satu tahun dan itu menandakan efektivitas manajemen persediaan. Berikut adalah perhitungan rasio aktivitas perputaran persediaan:

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{HPP}}{\text{Persediaan}}$$

$$\text{Rata-rata umur piutang} = 365/\text{Perputaran piutang}$$

### 3) Perputaran aktiva tetap

Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana efektivitas perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Berikut adalah perhitungan rasio aktivitas perputaran aktiva tetap:

$$\text{Perputaran Aktiva Tetap} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva tetap}}$$

### 3. Rasio solvabilitas.

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total hutangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca. Contoh rasio ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Rasio total hutang atas total aset

Rasio ini digunakan untuk menghitung seberapa jauh dana yang disediakan oleh kreditur. Rasio yang tinggi berarti perusahaan menggunakan leverage keuangan yang tinggi. Berikut adalah cara menghitung rasio ini :

$$\text{Rasio hutang atas aset} = \frac{\text{total hutang}}{\text{total asset}}$$

#### 2) Times Interest Earned (TIE)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang dengan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT). Bisa juga dikatakan rasio ini menghitung seberapa besar EBIT yang tersedia untuk menutup beban tetap bunga. Berikut adalah cara menghitung rasio ini :

$$TIE = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Bunga}}$$

#### 3) Fixed Charge Coverage

Rasio ini menghitung kemampuan perusahaan membayar beban tetap total, termasuk biaya sewa. Berikut adalah cara menghitung rasio ini :

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{EBIT} + \text{Biaya sewa}}{\text{Bunga} + \text{Biaya Sewa}}$$

#### 4. Rasio profitabilitas.

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Contoh dari rasio ini adalah sebagai berikut :

### 1) Profit Margin

Rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu. Berikut adalah cara menghitung rasio ini :

$$\textit{Profit Margin} = \frac{\textit{Laba Bersih}}{\textit{Penjualan}}$$

### 2) ROA

ROA (*Return On Asset*) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. ROA juga sering disebut juga sebagai ROI (*Return On Investment*). Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset, yang berarti efisiensi manajemen. Berikut adalah cara menghitung rasio ini:

$$\textit{ROA} = \frac{\textit{Laba Bersih}}{\textit{Total Asset}}$$

### 3) ROE

ROE (*Return On Equity*) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Meskipun rasio ini mengukur laba dari sudut pandang pemegang saham,

rasio ini tidak memperhitungkan dividen maupun *capital gain*. Berikut adalah cara menghitung rasio ini :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}}$$

#### 5. Rasio Pasar.

Rasio ini adalah rasio yang mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasar pada sudut investor (atau calon investor), meskipun pihak manajemen juga berkepentingan terhadap rasio-rasio ini. Contoh dari rasio ini adalah :

##### 1) PER

PER (*Price Earning Ratio*) adalah rasio yang melihat harga saham relatif terhadap earning-nya. PER bisa dihitung sebagai berikut:

$$PER = \frac{\text{Harga pasar per lembar}}{\text{Earning per lembar}}$$

##### 2) *Dividen Yield*

*Dividend Yield* merupakan sebagian dari total return yang akan diperoleh investor. *Dividend Yield* bisa dihitung sebagai berikut:

$$PER = \frac{\text{Dividend per lembar}}{\text{Harga pasar per lembar}}$$

##### 3) *Dividend Payout Ratio*

Rasio ini adalah rasio yang memperlihatkan bagian pendapatan yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor. DPR bisa dihitung sebagai berikut:

$$DPR = \frac{\text{Dividend per lembar}}{\text{Earning per saham}}$$

### **2.2.3. Return saham**

Menurut Robbert Ang (1997) dalam David Tjondro dan R Wilopo (2011), return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi saham yang dilakukannya. Tanpa adanya tingkat keuntungan yang dinikmati dari suatu investasi, tentunya investor tidak akan melakukan investasi. Lebih lanjut, dikatakan bahwa setiap investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang mempunyai tujuan untuk mendapatkan return baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut Jogiyanto (2000), return saham adalah keuntungan yang diterima investasi saham selama periode tertentu. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Beberapa pengukuran return realisasi yang banyak digunakan adalah return total, relatif return, kumulatif return, dan return disesuaikan.

Junaedi (2005) dalam Lely Dahlia dan Sylvia Veronica Siregar(2008) menyatakan bahwa laporan tahunan akan menjadi salah satu bahan rujukan bagi para investor dan calon investor dalam memutuskan apakah akan berinvestasi di dalam suatu perusahaan atau tidak. Dengan demikian, tingkat pengungkapan

(*disclosure level*) yang diberikan oleh pihak manajemen perusahaan akan berdampak kepada pergerakan harga saham yang pada gilirannya juga akan berdampak pada volume saham yang diperdagangkan dan *return*.

#### **2.2.4. Teori stakeholder (*Stakeholder Theory*)**

Perusahaan merupakan suatu entitas yang tidak bisa berdiri sendiri. Perusahaan pasti memiliki hubungan serta kepentingan terhadap suatu individu atau kelompok orang yang biasa disebut pemangku kepentingan (*stakeholder*). Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan (Post *et al*, 2002 dalam Ismail Solihin, 2009:2).

Jones (2007) dalam Ismail Solihin, (2009:2) mengklasifikasikan pemangku kepentingan ke dalam dua kategori yaitu : (1) *Inside Stakeholder* yakni orang-orang yang berada di dalam organisasi perusahaan misalnya saja pemegang saham (*shareholder*), para manager, dan karyawan. (2) *Outside Stakeholder* yakni orang-orang yang berada diluar perusahaan namun memiliki kepetingan terhadap perusahaan. Contohnya adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat lokal, masyarakat secara umum.

Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan harus memperhatikan tanggung jawab kepada pemangku kepentingannya. Menurut Post (2002) dalam Ismail Solihin (2009:3), secara simultan perusahaan akan menjalankan tiga jenis tanggung jawab yang berbeda-beda kepada pemangku kepentingan, dimana ketiga jenis tanggung jawab tersebut harus dijalankan secara seimbang. Penekanan



kepada salah satu jenis tanggung jawab saja akan menyebabkan perusahaan berjalan secara tidak optimal. Ketiga jenis tanggung jawab itu adalah *economic responsibility*, *legal responsibility*, dan *social responsibility*.

Jika diperhatikan dari pengertian diatas, tanggung jawab sosial perusahaan adalah salah satu tanggung jawab yang tidak boleh dilupakan. Tanggung jawab ini tentunya berhubungan dengan *outside stakeholder* yaitu kesejahteraan masyarakat baik yang ada disekitar perusahaan maupun masyarakat secara global. Dengan memperhatikannya, perusahaan diharapkan dapat beroperasi dengan baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

#### **2.2.5. Teori pensinyalan (Signalling Theory)**

Teori sinyal membahas mengenai dorongan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut disebabkan karena terjadinya asimetri informasi antara pihak manajemen dan pihak eksternal. Untuk mengurangi asimetri informasi maka perusahaan harus mengungkapkan informasi yang dimiliki, baik informasi keuangan maupun non keuangan. Salah satu informasi yang wajib diungkapkan oleh perusahaan adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility*. Informasi ini dapat dimuat dalam laporan tahunan perusahaan ataupun laporan sosial perusahaan secara terpisah. Dengan dikeluarkannya laporan ini, perusahaan mengharapkan adanya peningkatan reputasi dan nilai perusahaan. Seperti yang dikemukakan Wirakusuma dan Yuniasih dalam Eko Adi Kurnianto (2011), konsep teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan memberikan sinyal – sinyal

kepada pihak luar perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan pula adanya peningkatan kinerja perusahaan.

#### **2.2.6. Pengertian *corporate social responsibility* (CSR)**

Menurut Ismail Solihin (2009:1), konsep tanggung jawab sosial (*social responsibility*) ini sudah dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1950 dalam karyanya. Pendapat Bowen ini telah memberikan kerangka dasar bagi pengembangan konsep tanggung jawab sosial. Bowen menekankan bahwa kewajiban atau tanggung jawab sosial dari perusahaan harus bersandar kepada keselarasan dengan tujuan dan nilai-nilai dari suatu masyarakat. Sejak saat itu konsep tanggung jawab sosial mulai berkembang. Pada perkembangannya, kini dikenal konsep *sustainability development* yang didefinisikan oleh Brudtland Comission dalam Ismail Solihin (2009:26). The Brudland Comission ini sendiri dibentuk untuk menanggapi keprihatinan yang semakin meningkat dari para pemimpin dunia terutama menyangkut peningkatan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin cepat.

Konsep *sustainability development* memiliki dua ide utama di dalamnya yaitu:

- a. Untuk melindungi lingkungan dibutuhkan pembangunan ekonomi. Kemiskinan merupakan suatu penyebab penurunan kualitas lingkungan. Masyarakat yang kekurangan pangan, perumahan, dan kebutuhan dasar untuk hidup cenderung menyalahgunakan sumber daya alam hanya untuk tujuan

bertahan hidup. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan hidup membutuhkan standar hidup yang memadai untuk seluruh masyarakat dunia.

- b. Kendati demikian, pembangunan harus memperhatikan berkelanjutan, yakni dengan cara melindungi sumber daya yang dimiliki bumi bagi generasi mendatang. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dibenarkan dengan merusak hutan, lahan pertanian, air, dan udara di mana semua sumber daya tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia di planet ini. Kita harus menjadi penghuni bumi ini sebaik mungkin.

(Preston *et al* dalam Ismail Solihin, 2009:27)

Konsep sustainability development ini dalam perkembangannya dibentuk dalam tiga pilar yang berhubungan antara satu dan lainnya yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam *The United Nations 2005 World Summit Outcome Document*. Pengenalan konsep ini memberi dampak besar kepada perkembangan konsep CSR selanjutnya.

*The Organization for Economic Cooperation and Development*

(OECD) dalam Ismail Solihin (2009:28) merumuskan CSR sebagai berikut:

*“Business’s contribution to sustainable development and that cooperate behaviour most not only ensure returns to shareholders, wages to employee, and products and services to customers, but they must respond to societal and environmental concern and value”* (“kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan serta adanya perilaku korporasi yang tidak semata-mata menjamin adanya pengembalian bagi para pemegang saham, upah bagi para karyawan, dan pembuatan produk serta jasa bagi para pelanggan, melainkan perusahaan bisnis juga memberi perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai masyarakat”)

*The World Business Council for Sustainable Development* dalam

Ismail Solihin (2009:28) menyatakan CSR adalah

*“The continuing commitment by business to behave ethically and contribute the economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large”* (“komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat secara luas”)

Definisi CSR lainnya menurut Hopkins (2004) dalam Lindrawati (2008) :

*“CSR is concerned with treating the stakeholders of the firm ethically or in a responsible manner. Ethically or responsible means treating stakeholders in a manner deemed acceptable in civilized societies. Social includes economic responsibility. Stakeholders exist both within a firm and outside. The natural environment is a stakeholder. The wider aim of a social responsibility is to create a higher and higher standards of living, while preserving the profitability of the corporation, for people both within and outside the corporation”.*

UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga memberikan definisi dari tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pasal 1, yaitu:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan sertadalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Menurut Kartika Hedra Titisari, dkk (2010), dari beragam definisi CSR, ada satu kesamaan bahwa CSR tidak bisa lepas dari kepentingan *shareholder* dan *stakeholder* perusahaan. Konsep inilah yang kemudian diterjemahkan oleh John Elkington sebagai triple bottom line, yaitu : *Profit*, *People*, dan *Planet*. Maksudnya tujuan CSR harus mampu meningkatkan laba

perusahaan, menyejahterakan karyawan dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan.

Dari beberapa penjelasan mengenai CSR diatas, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan salah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap *outside stakeholder* karena timbulnya dampak yang diakibatkan adanya aktivitas operasional perusahaan. CSR dilakukan oleh perusahaan karena pada dasarnya perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada shareholder, namun juga pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

#### **2.2.7. Manfaat CSR**

Penerapan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial di suatu perusahaan tentunya akan memberikan dampak bagi perusahaan tersebut. Menurut Lindrawati, dkk (2008), dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap kepuasan stakeholder dengan bentuk program-program CSR akan berdampak pada reputasi dan pangsa pasar perusahaan. Hal ini akan bermanfaat untuk membantu perusahaan membangun hubungan baik dengan pemerintah, komunitas, dan *stakeholder* lainnya yang mampu menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum, meluaskan reputasi dan kredibilitas perusahaan.

Menurut Hopkins (2004) dalam Lindrawati (2008), perusahaan yang terlibat dalam aktivitas sosial akan membuat produk atau jasa perusahaan menjadi lebih atraktif dan menyentuh konsumen secara keseluruhan. Kondisi tersebut membuat perusahaan lebih menguntungkan. Meskipun pada awal mengimplementasikan CSR akan meningkatkan biaya (*cost*) bagi perusahaan,

namun keuntungan yang akan didapat perusahaan nantinya akan jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan perusahaan.

Goukasian dan Whitney (2009) dalam Lindrawati, dkk (2008) mengatakan bahwa kualitas CSR memungkinkan perusahaan membangun hubungan yang efektif dengan *stakeholder* (tidak hanya *shareholder*), meningkatkan daya saing perusahaan, dan menyediakan keuntungan kompetitif dalam pasar bagi produk perusahaan, selanjutnya akan berdampak pada kinerja keuangan yang lebih tinggi.

Dibalik keuntungan dan manfaat dari pelaksanaan CSR pada perusahaan, ada tanggapan negatif dari kelompok-kelompok yang menentang adanya CSR. Kelompok ini mengkritik pelaksanaan CSR oleh berbagai perusahaan korporasi di dunia yang hanya bertujuan untuk meningkatkan reputasi mereka di mata publik maupun pemerintah dan bukan tulus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Handayani Tri Wijayanti (2011) memberikan contoh ketidaktulusan ini adalah perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial hanya untuk mendapatkan laporan yang menyenangkan dari media massa, aktivis lingkungan, legitimasi dari komunitas lokal (LSM), kemudahan regulasi, dan berkurangnya kritikan dari investor dan pekerja.

Pada dasarnya pelaksanaan aktivitas CSR oleh perusahaan ini bisa membawa banyak manfaat, tidak hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi *stakeholder* itu sendiri. Bagi *stakeholder*, aktivitas CSR dapat membawa keuntungan berupa meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan terjaganya lingkungan di sekitar perusahaan dari dampak buruk jangka panjang yang

ditimbulkan aktivitas operasional perusahaan. Bagi perusahaan, aktivitas CSR yang bisa dikatakan sebagai salah satu strategi bisnis perusahaan dapat meningkatkan reputasi perusahaan yang berujung pada meningkatnya kinerja dari perusahaan itu sendiri.

### **2.2.8. Pelaksanaan CSR di Indonesia**

Menurut Ismail Solihin (2009:161), perkembangan CSR untuk konteks Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, pelaksanaan CSR memang merupakan praktik bisnis secara sukarela. Artinya pelaksanaan CSR berasal dari inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut untuk dilakukan perusahaan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, pelaksanaan CSR sudah diatur Undang-Undang. Peraturan yang mengatur pelaksanaan CSR ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74. Di dalam pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain peraturan diatas, terdapat juga peraturan mengenai pengungkapan aktivitas CSR di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 ayat 2 poin C yang mengatakan bahwa laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya tentang Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk membantu pengembangan, pengukuran, dan pelaporan pelaksanaan CSR, maka dibuatlah sebuah organisasi independen yang bernama NSCR (*National Center for Sustainability Reporting*). NSCR Indonesia memiliki anggota dari korporasi, organisasi, dan individu-individu profesional yang mempunyai visi dan komitmen yang sama dalam menerapkan dan mengembangkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Untuk memacu perusahaan-perusahaan mengungkapkan kegiatan CSR-nya, NSCR membuat sebuah ajang penghargaan yang bernama ISRA (*Indonesia Sustainability Reporting Awards*). Dengan adanya ISRA ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan sustainability report di Indonesia.

#### **2.2.9. Laporan berkelanjutan (*Sustainability Report*)**

Saat ini berbagai perusahaan multinasional, baik yang bergerak di bidang manufaktur, perdagangan, ataupun jasa, mengungkapkan *corporate governance* beserta dampak yang ditimbulkannya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam *Sustainability Report*. *Sustainability report* adalah bentuk dari laporan pelaksanaan tanggung jawab dan sosial yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan. *Sustainability report* ada yang terpisah dan ada juga yang berada dalam laporan tahunan suatu perusahaan. Menurut Ismail Solihin (2009:147), berbagai perusahaan besar di dunia seperti Unilever, Procter dan Gamble, Carrefour,



Freeport, UPS, dan PT Aneka Tambang saat ini menyusun *sustainability report* mereka dengan menggunakan kerangka *sustainability report* yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). GRI itu sendiri merupakan organisasi non profit yang mengembangkan keberlanjutan ekonomi.

Menurut pedoman laporan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh GRI, Laporan keberlanjutan adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Laporan Keberlanjutan merupakan sebuah istilah umum yang dianggap sinonim dengan istilah lainnya untuk menggambarkan laporan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial (misalnya *triple bottom line*, laporan pertanggungjawaban perusahaan, dan lain sebagainya). Laporan Keberlanjutan yang disusun berdasarkan Kerangka Pelaporan GRI mengungkapkan keluaran dan hasil yang terjadi dalam suatu periode laporan tertentu dalam konteks komitmen organisasi, strategi, & pendekatan manajemen.

#### **2.2.10. Standar pengungkapan *sustainability report***

Berdasarkan pedoman laporan berkelanjutan (*sustainability report*) yang dikeluarkan oleh GRI, terdapat standar pengungkapan dimana di dalam standar tersebut terdapat indikator kinerja yang harus dilaporkan ke dalam *Sustainability Report*. Terdapat tiga jenis pengungkapan yang terkandung dalam bagian standar pengungkapan yaitu:

a. Strategi dan Profil

Pengungkapan yang menentukan konteks keseluruhan dalam memahami kinerja organisasi, seperti strategi, profil dan tata kelola.

b. Pendekatan Manajemen

Pengungkapan yang mencakup bagaimana sebuah organisasi mengarahkan seperangkat topik dalam menyediakan konteks untuk memahami kinerja pada wilayah tertentu.

c. Indikator Kinerja

Indikator yang menghasilkan perbandingan informasi mengenai kinerja organisasi dalam hal ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Dalam masing-masing standar pengungkapan ini terdapat beberapa aspek yang harus diungkapkan. Selanjutnya, di dalam aspek-aspek tersebut, terdapat juga item-item yang harus diungkapkan. Jika bagian strategi dan profil dan juga pendekatan manajemen hanya dibagi atas beberapa aspek, indikator kinerja masih dibagi dalam beberapa indikator pelaksanaan. Indikatornya berupa indikator pelaksanaan pengungkapan ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Aspek-aspek dari masing-masing standar dan item-item yang harus dilaporkan pada indikator kinerja di atas terjabarkan dalam tabel 2.1 hingga tabel 2.8 berikut ini:

Tabel 2.1  
ASPEK STANDAR PENGUNGKAPAN *SUSTAINABILITY REPORT*

Jenis Pengungkapan	Aspek
Strategi dan Profil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi dan analisis</li> <li>2. Profil organisasi</li> <li>3. Parameter laporan</li> <li>4. Tata kelola, komitmen, dan keterlibatan</li> <li>5. Pendekatan manajemen dan Kinerja indikator</li> </ol>
Pendekatan Manajemen dan Indikator Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekonomi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja ekonomi</li> <li>b. Kehadiran pasar</li> <li>c. Dampak ekonomi tidak langsung</li> </ol> </li> <li>2. Lingkungan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Material</li> <li>b. Energi</li> <li>c. Air</li> <li>d. Biodiversitas</li> <li>e. Emisi, Efluen, dan Limbah</li> <li>f. Produk dan Jasa</li> <li>g. Kepatuhan</li> <li>h. Pengangkutan/Transportasi</li> <li>i. Menyeluruh</li> </ol> </li> <li>3. Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pekerjaan</li> <li>b. Tenaga kerja/hubungan manajemen</li> <li>c. Kesehatan dan Keselamatan jabatan</li> <li>d. Pelatihan dan pendidikan Keberagaman dan kesempatan setara</li> </ol> </li> <li>4. Hak Asasi Manusia               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Praktek investasi dan pengadaan</li> <li>b. Nondiskriminasi</li> <li>c. Kebebasan berserikat dan berunding bersama berkumpul</li> <li>d. Pekerja anak</li> <li>e. Kerja paksa dan kerja wajib</li> <li>f. Praktek/tindakan pengamanan</li> <li>g. Hak penduduk asli</li> </ol> </li> <li>5. Masyarakat               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komunitas</li> <li>b. Korupsi</li> <li>c. Kebijakan publik</li> <li>d. Kelakuan tidak bersaing</li> <li>e. Kepatuhan</li> </ol> </li> <li>6. Tanggung Jawab Produk               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kesehatan dan keamanan pelanggan</li> <li>b. Pemasangan label bagi produk dan jasa</li> <li>c. Komunikasi pemasaran</li> <li>d. Keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan</li> <li>e. Kepatuhan</li> </ol> </li> </ol>

Sumber : Pedoman Laporan Keberlanjutan

Tabel 2.2  
ITEM YANG DIUNGKAPKAN BERDASARKAN STRATEGI DAN PROFIL

Aspek	Item yang Harus Diungkapkan
Strategi dan Analisis	1.1. Pernyataan dari pejabat pembuat kebijakan yang paling senior dalam organisasi (misalnya CEO, ketua, atau posisi senior sejenis) mengenai relevansi keberlanjutan terhadap organisasi dan strateginya. 1.2. Deskripsi dampak, risiko, dan peluang utama.
Profil Organisasi	2.1. Nama organisasi. 2.2. Merek, produk, dan atau jasa utama. 2.3. Struktur operasional organisasi, termasuk didalamnya divisi utama, perusahaan yang menjalankan usaha (operating companies), perusahaan anak (anak perusahaan) dan usaha patungan. 2.4. Lokasi kantor pusat organisasi. 2.5. Jumlah negara di mana perusahaan beroperasi, serta nama negara di mana operasi utama dilaksanakan, atau yang relevan dengan isu keberlanjutan yang dicakup dalam laporan. 2.6. Sifat kepemilikan dan bentuk legal. 2.7. Pasar yang dilayani (termasuk di dalamnya diperinci berdasarkan geografi, sektor yang dilayani dan jenis konsumen/penerima manfaat). 2.8. Skala organisasi 2.9. Perubahan signifikan yang terjadi selama periode laporan terkait ukuran, struktur, dan kepemilikan, 2.10. Penghargaan yang diterima dalam periode laporan.
Profil Laporan	3.1. Periode pelaporan (misalnya tahun fiskal/kalender) dari informasi yang tersedia. 3.2. Tanggal dari laporan sebelumnya yang paling baru (jika ada). 3.3. Siklus Pelaporan (tahunan, dua tahun sekali, dan sebagainya). 3.4. Alamat Kontak apabila ada pertanyaan terkait laporan dan isinya. 3.5. Proses dalam menetapkan isi laporan 3.6. Batasan laporan (misalnya negara, divisi, perusahaan anak, fasilitas yang disewakan, usaha patungan, pemasok). Lihat Protokol Batasan GRI untuk panduan lebih lanjut. 3.7. Nyatakan setiap keterbatasan ruang lingkup atau batasan laporan . 3.8. Dasar untuk melaporkan usaha patungan, perusahaan anak, fasilitas yang disewakan, operasi yang di-outsorce serta entitas lainnya yang mempengaruhi secara signifikan, sehingga dapat diperbandingkan informasinya dari waktu ke waktu dan atau antara organisasi. 3.9. Teknik pengukuran data dan dasar perhitungannya, termasuk di dalamnya asumsi dan teknik yang mendasari estimasi yang diterapkan dalam mengkompilasi Indikator dan informasi lainnya dalam laporan. 3.10. Penjelasan dampak dari pernyataan ulang terhadap informasi yang disediakan dalam laporan sebelumnya, serta alasan untuk pembuatan pernyataan ulang tersebut (misalnya karena merger/akuisisi, perubahan dasar tahun/periode yang digunakan, sifat usaha, metode pengukuran). 3.11. Perubahan signifikan dari laporan periode sebelumnya terkait ruang lingkup, batasan, atau metode pengukuran yang digunakan dalam laporan. 3.12. Tabel yang menunjukkan lokasi dari Standar Pengungkapan dalam laporan. 3.13. Kebijakan dan praktek saat ini yang ditujukan untuk mencari assurance eksternal untuk laporan. Jika tidak memasukkan laporan assurance, untuk mendampingi laporan keberlanjutan, jelaskan ruang lingkup dan dasar dari setiap assurance eksternal yang tersedia.

Aspek	Item yang Harus Diungkapkan
Tata Kelola, Komitmen, dan Keterlibatan	<p>4.1. Struktur tata kelola organisasi, termasuk komite di bawah badan pengelola tertinggi yang bertanggung jawab untuk tugas khusus, seperti dalam menetapkan strategi atau mekanisme pengawasan organisasi.</p> <p>4.2. Tunjukkan apakah Ketua dari badan pengelola tertinggi juga merangkap pejabat eksekutif (dan jika ternyata iya, maka tunjukkan fungsi mereka dalam pengelolaan organisasi dan alasan mengapa terjadi kondisi semacam itu).</p> <p>4.3. Untuk organisasi yang memiliki struktur satu dewan, nyatakan jumlah anggota dari badan pengelola tertinggi yang berasal dari kelompok independen dan atau anggota noneksekutif.</p> <p>4.4. Mekanisme untuk pemegang saham dan pegawai dalam menyampaikan rekomendasi atau arahan kepada badan pengelola tertinggi.</p> <p>4.5. Hubungan antara kompensasi untuk anggota badan pengelola tertinggi, manajer senior, dan eksekutif (termasuk dalam hal pengaturan perjalanan) dengan kinerja organisasi (termasuk didalamnya kinerja sosial dan ekonomi).</p> <p>4.6. Proses yang ada di dalam badan pengelola tertinggi untuk dalam menjamin terhindarnya konflik kepentingan.</p> <p>4.7. Proses dalam menentukan kualifikasi dan keahlian dari anggota badan pengelola tertinggi dalam mengarahkan strategi organisasi terkait topik ekonomi, lingkungan, dan sosial.</p> <p>4.8. Pengembangan secara internal pernyataan misi atau nilai, kode tingkah laku, dan prinsip yang relevan dengan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial serta status dari implementasinya.</p> <p>4.9. Prosedur dalam badan pengelola tertinggi untuk mengawasi manajemen dan identifikasi organisasi terhadap kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial, termasuk di dalamnya risiko dan peluang yang relevan, serta ketaatan atau kepatuhannya terhadap standar internasional yang telah disetujui, kode perbuatan, dan prinsip.</p> <p>4.10. Proses dalam mengevaluasi kinerja dari badan pengelola tertinggi, khususnya yang terkait dengan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial.</p> <p>4.11. Penjelasan mengenai bagaimana pendekatan atau prinsip pencegahan digunakan oleh organisasi.</p> <p>4.12. Piagam, prinsip, atau inisiatif lainnya yang dikembangkan secara eksternal terkait ekonomi, lingkungan, dan sosial yang turut didukung/diadopsi oleh organisasi.</p> <p>4.13. Keanggotaan dalam asosiasi (seperti asosiasi industri) dan atau organisasi advokasi nasional/internasional</p> <p>4.14. Daftar kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan oleh organisasi.</p> <p>4.15. Dasar yang digunakan dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan yang akan dilibatkan.</p> <p>4.16. Pendekatan yang digunakan untuk melibatkan pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya frekuensi pelibatan berdasarkan jenis dan kelompok pemangku kepentingan.</p> <p>4.17. Topik dan perhatian utama yang dimunculkan melalui pelibatan pemangku kepentingan, dan bagaimana organisasi merespons topik dan perhatian utama tersebut, termasuk melalui pelaporannya.</p>

Sumber : Pedoman Laporan Keberlanjutan

Tabel 2.3  
INDIKATOR PELAKSANAAN PENGUNGKAPAN EKONOMI

<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>
Kinerja ekonomi	<p>EC1 Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.</p> <p>EC2 Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi.</p> <p>EC3 Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti.</p> <p>EC4 Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.</p>
Kehadiran Pasar	<p>EC5 Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan.</p> <p>EC6 Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.</p> <p>EC7 Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.</p>
Dampak ekonomi tidak langsung	<p>EC8 Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura, atau pro bono.</p> <p>EC9 Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.</p>

Sumber : Pedoman Laporan Keberlanjutan

Tabel 2.4  
INDIKATOR PELAKSANAAN PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN

<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>
Material	<p>EN1 Penggunaan Bahan; terperinci berdasarkan berat atau volume</p> <p>EN2 Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang</p>
Energi	<p>EN3 Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer</p> <p>EN4 Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer</p> <p>EN5 Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi</p> <p>EN6 Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.</p> <p>EN7 Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai</p>

<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>
Air	EN8 Total pengambilan air per sumber EN9 Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air EN10 Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang
Biodiversitas	EN11 Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan dengan daerah yang diproteksi (dilindungi?) atau daerah-daerah yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi EN12 Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi) EN13 Perlindungan dan Pemulihan Habitat EN14 Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati EN15 Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi
Emisi, Efluen dan Limbah	EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat EN17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya EN19 Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozone-depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat EN20 NO <sub>x</sub> , SO <sub>x</sub> dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan berat EN21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan EN22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan EN23 Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan EN24 Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional. EN25 Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.
Produk dan Jasa	EN26 Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut. EN27 Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.
Kepatuhan	EN28 Nilai Moneter Denda yang signifikan & jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran hukum dan regulasi lingkungan.

<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>
Pengangkutan/ Transportasi	EN29 Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan
Menyeluruh	EN30 Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.

Sumber : Pedoman Laporan Keberlanjutan

Tabel 2.5  
INDIKATOR PELAKSANAAN PENGUNGKAPAN PRAKTEK TENAGA  
KERJA DAN PEKERJAAN YANG LAYAK

<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>
Pekerjaan	LA1 Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah. LA2 Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah. LA3 Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.
Tenaga kerja / Hubungan Manajemen	LA4 Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut. LA5 Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.
Kesehatan dan Keselamatan Jabatan	LA6 Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan. LA7 Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah. LA8 Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya. LA9 Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat karyawan.
Pelatihan dan Pendidikan	LA10 Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan. LA11 Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menjangkau kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier. LA12 Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur.
Keberagaman dan Kesempatan Setara	LA13 Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain. LA14 Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok/kategori karyawan.

Sumber : Pedoman Laporan Keberlanjutan



Tabel 2.6  
INDIKATOR PELAKSANAAN PENGUNGKAPAN HAK ASASI MANUSIA

Aspek	Indikator
Praktek Investasi dan Pengadaan	<p>HR1 Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.</p> <p>HR2 Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM</p> <p>HR3 Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan dan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan.</p>
Nondiskriminasi	HR4 Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.
Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama Berkumpul	HR5 Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diteridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.
Pekerja Anak	HR6 Kegiatan yang identifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.
Kerja Paksa dan Kerja Wajib	HR7 Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.
Praktek/Tindakan Pengamanan	HR8 Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi
Hak Penduduk Asli	HR9 Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil.

Sumber : Pedoman Laporan Keberlanjutan

Tabel 2.7  
INDIKATOR PELAKSANAAN PENGUNGKAPAN MASYARAKAT

<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>
Komunitas	S01 Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada saat mengakhiri.
Korupsi	S02 Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi. S03 Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi. S04 Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.
Kebijakan Publik	S05 Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik. S06 Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi.
Kelakuan Tidak Bersaing	S07 Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya.
Kepatuhan	S08 Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.

Sumber : Pedoman Laporan Keberlanjutan

Tabel 2.8  
INDIKATOR PELAKSANAAN PENGUNGKAPAN  
TANGGUNG JAWAB PRODUK

<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>
Kesehatan dan Keamanan Pelanggan	PR1 Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut PR2 Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk.
Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa	PR3 Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut. PR4 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, per produk. PR5 Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasan pelanggan.

Aspek	Indikator
Komunikasi Pemasaran	PR6 Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship. PR7 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut produknya.
Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan	PR8 Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Kepatuhan	PR9 Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa

Sumber : Pedoman Laporan Keberlanjutan

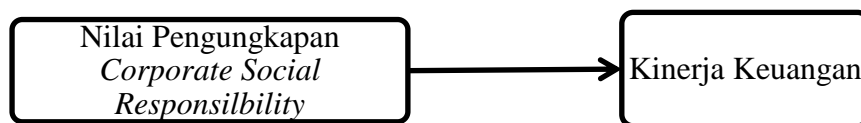
### 2.3. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia konsep CSR sebenarnya sudah mulai disadari oleh perusahaan-perusahaan di sini. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satu jenis perusahaan yang menjalankan kegiatan berkaitan dengan sumber daya alam adalah perusahaan manufaktur.

Perusahaan yang menjalankan aktivitas CSR dengan baik tentunya akan mendapatkan reputasi yang tinggi di mata masyarakat dan memudahkan diterimanya produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Dengan reputasi yang tinggi ini akan meningkatkan kinerja perusahaan. Pada penelitian ini, penulis memilih rasio profitabilitas untuk mengukur baik atau tidaknya kinerja keuangan perusahaan yaitu berupa ROA dan ROE. Selain itu digunakan juga return saham yang memperlihatkan return yang diterima oleh investor. Penulis menggunakan indikator ini karena pada dasarnya keputusan investor untuk berinvestasi sering kali diukur berdasarkan berapa banyak keuntungan yang bisa didapat oleh

investor tersebut, dan rasio profitabilitas adalah salah satu indikator yang dapat memperlihatkan besarnya keuntungan yang bisa didapat para investor saat berinvestasi.

Penelitian ini akan melihat pengaruh dari aktivitas CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tingkat aktivitas CSR diukur dari nilai pengungkapannya pada *sustainability report* dan *annual report*, sedangkan kinerja keuangan diukur dengan menggunakan ROA, ROE, dan return saham yang diterima investor. Dilihat dari hubungan antara kinerja keuangan dan CSR, maka dalam penelitian ini kerangka berpikir akan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

#### 2.4. Hipotesis

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) akan berdampak pada meningkatnya reputasi perusahaan. Dengan tingginya reputasi perusahaan di mata masyarakat tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada perusahaan tersebut sehingga berdampak positif pada penjualan produk/jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ini sejalan dengan pendapat Hopkins (2004) dalam Lindrawati (2008) yang menyatakan bahwa perusahaan yang terlibat dalam aktivitas sosial akan membuat produk atau jasa

perusahaan menjadi lebih atraktif dan menyentuh konsumen secara keseluruhan. Penjualan produk/jasa perusahaan yang tinggi tentunya akan berdampak baik pula bagi laba yang didapatkan oleh perusahaan. Semakin banyak produk/jasa perusahaan yang terjual, didukung dengan efisiensi beban-beban yang dikeluarkan tentunya akan menimbulkan laba yang tinggi bagi perusahaan. Laba perusahaan tinggi tidak bisa menjadi jaminan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang tinggi. Diperlukan analisis lain untuk mengukur kinerja perusahaan dari sisi profitabilitas. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah ROA, ROE.

Menurut Junaedi (2005) dalam Lely Dahlia dan Sylvia Veronica Siregar(2008), tingkat pengungkapan (*disclosure level*) yang diberikan oleh pihak manajemen perusahaan dalam laporan tahunan akan berdampak kepada pergerakan harga saham yang pada gilirannya juga akan berdampak pada volume saham yang diperdagangkan dan *return*. Jika perusahaan mengungkapkan hal yang positif, yakni mengenai program yang berhubungan dengan CSR, diharapkan akan direspon oleh para investor, yang pada akhirnya akan berdampak pada pergerakan harga saham dan pada akhirnya pada return saham.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba menganalisa pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja yang diukur dengan ukuran rasio profitabilitas. Lindrawati dkk (2009) dalam penelitiannya menganalisis pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan dengan variabel ROE dan ROI. Berdasarkan analisis dan pembahasan ditemukan bukti empiris bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, namun berpengaruh secara signifikan terhadap ROI. Nurika Restuningdiah (2010) menyimpulkan pengungkapan kinerja sosial dan

kinerja lingkungan dalam laporan tahunan yang diungkapkan dalam CSR disclosure berpengaruh terhadap ROA. Susi Sarumpaet (2005) memberikan bukti empiris yang berbeda. Penelitiannya menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA, akan tetapi ukuran perusahaan berhubungan secara signifikan terhadap kinerja lingkungan.

Brammer *et al* (2005) menginvestigasi hubungan antara *Corporate Social Performance* dengan *Financial Performance* yang diukur dengan *stock return* untuk perusahaan-perusahaan di UK. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa *environment* dan *employment* berkorelasi negatif dengan *return*. Penelitian Sayekti dan Wondabio (2007) menguji pengaruh CSR terhadap ERC yang diukur dengan CAR. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pengungkapan informasi CSR berpengaruh terhadap ERC. Titisari, dkk (2010) yang juga meneliti pengaruh CSR terhadap stock return (diproksi dengan CAR) mendapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan pengujiannya, CSR tidak berpengaruh terhadap *stock return*. Penelitian yang dilakukan oleh Lely Dahlia dan Sylvia Veronica Siregar (2008) memiliki hasil yang sama dengan Kartika Hendra Titisari. Penelitian ini menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *cumulative abnormal return*.

Melihat dari studi literatur yang ada dan penelitian sebelumnya, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1 : Nilai pengungkapan aktivitas CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.